



Rencana Kerja

RENJA

TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kompleks Perkantoran Bupati Gedung Kembar B Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi, Telp. (0541) 662295-6666380
Kode Pos 75511 TENGGARONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur Alhamdulillah Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2022 ini dapat dijadikan acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ***“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***

Tenggarong, 30 Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara



DETI BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
19740111 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin capai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

21. Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

b. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2022

.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD TAHUNAN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD, serta Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Kebijakan Terhadap Kebijakan Program Nasional, Tujuan dan Sasaran PD..

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan dan mengalami perubahan kegiatan dikarenakan adanya pandemi covid-19, pada Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yaitu kegiatan promosi melalui pameran 4 event menjadi 1 event, anggaran dilakukan perubahan pada pengadaan peralatan gedung kantor dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana promosi ke depan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA serta Pengukuran capaian kinerja tentang pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan pada tabel 1 berikut :

TABEL T – C .29

REKAPTULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2019)	Target dan realisasi kinerja program dan kkegiatan Tahun Berjalan (2020)			Catatan Penting	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target RENJA - PD TAHUN (2020)	Realisasi RENJA - PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
0000.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran							
0000.01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2 rekening	12 Bulan	12 Bulan	90%		
0000.01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	46 unit	46 unit	48 unit	48 unit	90%		

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

0000.01	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	-	31 orang	12 Bulan	12 Bulan	90%			
0000.01	14	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Peralatan yang di perbaikan	15 unit	46 unit	6 unit	6 unit	90%			
0000.01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	46 Jenis	46 Jenis	48 Jenis	48 Jenis	90%			
0000.01	07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan	22 Jenis	15 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	90%			
0000.01	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan	1.000 eks	5.400 eks	5.000 eks	5.000 eks	90%			
0000.01	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	13 jenis	13 jenis	22 jenis	22 jenis	90%			
0000.01	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	150 porsi	6450 porsi	3.000 porsi	3.000 porsi	90%			
0000.01	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah aparat yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	90%			
0000.01	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai dan Pranko	800 lembar	900 lembar	800 lembar	800 lembar	90%			
0000.01	13	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung Non PNS	52 orang	48 orang	52 orang	52 orang	90%			
0000.01	16	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Arsip	1.000 dokumen	-	1.000 dokumen	1.000 dokumen	90%			

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

0000.02		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur								
0000.02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 Paket		10 Paket	10 Paket	90%			
0000.02	01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	5 Paket	6 Paket						
0000.02	03	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	32 unit	35 unit	42 unit	42 unit	90%			
0000.02	04	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor dipelihara	20 unit							
0000.02	05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	35 kegiatan		30 kegiatan	30 kegiatan	90%			
0000.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur								
0000.03		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 stel							
0000.03		Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Jumlah Stel pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			300 stel	300 stel	80%			
0000.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur								

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

0000.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal	38 Aparatur	40 Orang	75 Aparatur	75 Aparatur	80%			
0000.05	01	Pemeliharaan SMM-ISO 9001 : 2008			1 Dokumen						
0000.05	03	Fasilitasi Tim Bekias	Jumlah Aparatur yang difasilitasi	15 Aparatur	15 Orang	15 Aparatur	15 Aparatur	80%			
0000.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
0000.06	17	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%			
0000.06	23	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
0000.06	10	Penyusunan Revisi RENSTRA	Jumlah dokumen	1 Dokumen							
0000.06	113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah tenaga	28 Orang							
0000.06	114	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah tenaga	5 Orang							

0212.02		Program Peningkatan Dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan								
0212.02	004	Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah aparatur	30 Kegiatan	600 Izin						
0212.02	006	Fasilitasi Pelayanan Perizinan 1	Jumlah Izin yang diterbitkan	150 Izin		150 Izin	150 Izin	1 Jam			
0212.02	007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan 2	Jumlah Izin yang diterbitkan	150 Izin		150 Izin	150 Izin	2 Jam			
0212.02	008	Fasilitasi Pelayanan Perizinan 3	Jumlah Izin yang diterbitkan	150 Izin		150 Izin	150 Izin	3 Jam			
0212.03		Program Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan								
0212.03	006	Penyediaan Database Perizinan	Jumlah	1 database	1 Paket Data	1 database	1 database	85%			
0212.03		Monitoring Pendampingan Penerapan SIL di Kecamatan se Kab. Kukar serta Update Aplikasi SIL ke Kementerian Kominfo RI Pengembangan Aplikasi SIL dan Integritas Aplikasi Perizinan Online serta Pendampingan penggunaan Aplikasi Perizinan	Monitoring Pendampingan		18 Kecamatan						

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

0212.03	007	Pengembangan Aplikasi SIL dan Integritas Aplikasi Perizinan Online serta Pendampingan penggunaan Aplikasi Perizinan	Tingkat pengembangan sistem IT	60 porsentase		60 porsentase	60 porsentase	85%			
0212.03	008	Pelayanan Elektronik Sektor Kesra dan Ekonomi	Jumlah pemohon yang di dampingi	200 Orang		120 Orang	120 Orang	85%			
0212.03	009	Pelayanan Elektronik Sektor Pembangunan	Jumlah pemohon yang di dampingi	200 Orang		120 Orang	120 Orang	85%			
0212.03	003	Survey IKM	Jumlah Dokumen	1 Nilai	1 Dokumen	1 Skor	1 Skor	85%			
0212.15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA								
,0212.15	001	Pameran Promosi Dalam Daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum Bisnis	Jumlah event yang diikuti	4 event	2 event	4 event	1 event	44 Jumlah			
,0212.15	002	Temu Kerjasama Pelaku Usaha Nasional	Jumlah Dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	44 Jumlah			
,0212.15	003	Penyusunan Perbup RUPM	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati			1 dokumen	1 dokumen	44 Jumlah			
,0212.15	003	Kajian Potensi Investasi	Jumlah dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	44 Jumlah			
,0212.15	004	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID) Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	44 Jumlah			
,0212.15	005	Fasilitasi kerjasama kemitraan UMKM melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen	1 dokumen							
,0212.15	006	Forum Dialog Peningkatan Investasi	Jumlah pertemuan	1 jumlah		1 jumlah	1 jumlah	44 Jumlah			

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

,0212.04		Program Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatnya kesadaran perusahaan dengan kewajibannya								
0212.04	011	Pengaduan dan Advokasi	Jumlah aduan yang terselesaikan	20 Pengaduan		20 Pengaduan	20 Pengaduan	50 Jumlah			
0212.04	004	Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dievaluasi dan dibina	20 perusahaan		20 perusahaan	20 perusahaan	50 Jumlah			
0212.04		Pemantauan Penanaman Modal	Tersebar		20 perusahaan						
0212.04		Pembinaan Penanaman Modal	Tersebar		20 perusahaan						
0212.04		Pengawasan Penanaman Modal dan CSR	Tersebar		20 perusahaan						
0212.04	003	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau dan diawasi	20 perusahaan		20 perusahaan	20 perusahaan	50 Jumlah			
0212.04	008	Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Program CSR	Jumlah peserta yang mengikuti rakor dan Program CSR	50 perusahaan		50 perusahaan	50 perusahaan	50 Jumlah			
0212.04	006	Pendataan Perusahaan yang belum memiliki izin prinsip penanaman modal	Jumlah perusahaan yang di data	20 dokumen							
0212.04	007	Bimtek tatacara penyampaian LKPM dan Integrasi Program CSR	Jumlah peserta yang mengikuti rakor dan Program CSR	50 peserta							
0212.04	010	Penyelenggaraan CSR dan LKPM Award	1 Wilayah		20 perusahaan						
0212.04	010	Penyenggaraan CSR Award dan LKPM Award	Jumlah peserta yang mengikuti rakor dan Program CSR	50 perusahaan							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Pada tahun 2020, target untuk indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum pada capaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Target tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun berikutnya. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu pada tahun 2020 yang disebabkan oleh wabah Covid-19 dan isu politik lainnya, akan menyulitkan pencapaian target pada tahun berjalan ini sehingga juga menggeser perkiraan capaian realisasi.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah urusan penanaman modal, maka Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, diuraikan pada tabel 2 berikut :

TABEL T - C .30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisa si Capaia n Tahun 2020	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			64,64	68,00	72,00	75,00	80,00	-	76,00	80,75	
2	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN/PMA)			1,53	1,54	1,59	1,65	1,68	1,69	-	1,72	
3	Jumlah Investor Baru (PMDN / PMA)			38	40	42	44	48	60	-	80	
4	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Triliyun Rupiah)			3,10	3,14	3,17	3,20	3,23	3,76	3,8	3,90	
5	Realisasi Penanaman Modal (PMDN/PMA)			85	87	90	95	100	100	90	95	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75	80	83	85	87	83,73	85	87	
7	Rata-rata lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan (jam)			1,12	1,08	1,04	1,00	0,97	2,14	1,32	1,20	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi PD

2.3.1 Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada pelayanan perizinan dan non perizinan , penanganan pengaduan dan promosi yang dapat meningkatkan nilai investasi, pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

- a. Belum semua Norma Standar Pedoman Kreteria /NSPK kementerian/lembaga terbit ;
- b. Masih terjadinya tumpang tindih aturan antar NSPK K/L
- b. Belum semua perizinan dan non perizinan diserahkan oleh OPD teknis;
- c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka pelayanan perizinan;

- d. Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan terhadap Capaian Program Daerah Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara “ Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan “ . Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu :

1. memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan tranformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya ayam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara , sebagai garda depan investasi di Kutai Kartanegara, menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan non perizinan untuk meningkatkan daya saing investasi daerah pada PMDN maupun PMA dan memberikan kemudahan perizinan bagi investor, dalam rangka mendukung misi 5 Bupati Kutai Kartanegara yaitu

Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan perizinan dan investasi di Kutai Kartanegara, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan, antara lain:

- a. Data peta potensi investasi informasi yang baru disusun, belum tersebar luas kepada para calon investor
- b. Belum dibuatnya peraturan daerah tentang pemberian insentif fasilitas kemudahan Penanaman Modal
- c. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi
- d. Tingginya target realisasi investasi
- e. Tingginya target rasio pertumbuhan investasi
- f. Adanya ketidak sinkronisasi regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan antarm K/L
- g. Kurangnya SDM yang handal dalam proses pelayanan perizinan dan investasi
- h. Kurang sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanaman modal dan perizinan
- b. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan iklim yang baik, sangat mendukung investasi di sektor pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
- c. Posisi geografis yang strategis karena sebagai IKN
- e. Infrastruktur transportasi yang mulai membaik

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai

Kartanegara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi PMDN dan PMA, serta pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang berorientasi kepada pengembangan potensi unggulan daerah.

Beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah:

1. Penyusunan strategi dan peningkatan promosi penanaman modal yang lebih inovatif
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Penyusunan regulasi kebijakan investasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan Penanaman Modal
4. Peningkatan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pemutakhiran data peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Kutai Kartanegara berbasis sistem aplikasi
6. Peningkatan kualitas pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan Penanaman Modal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan sebelum penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

TABEL T - C. 31

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				29.464.543.729,00					29.464.543.729,00	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%	20.664.543.729,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	20.664.543.729,00	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				435.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				435.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	65.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	200.000.000,00	
	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	15.837.044.929,00	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	15.837.044.929,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah ASN DPMPSTP		14.115.112.211,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah ASN DPMPSTP		14.115.112.211,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD	Jumlah Pendukung Non ASN	49 Orang	1.191.932.998,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD	Jumlah Pendukung Non ASN	49 Orang	1.191.932.998,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	OPD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	OPD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	384.999.720,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah dokumen	3 Dokumen	384.999.720,00	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	OPD		100%	54.998.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	OPD		100%	54.998.800,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen	2 Dokumen	39.999.800,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen	2 Dokumen	39.999.800,00	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD			100.000.000,00						
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100%	50.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100%	50.000.000,00	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	Jumlah dokumen SK	100%	50.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	Jumlah dokumen SK		50.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	780.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	780.000.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	100.000.000,00	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Aparatur	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Aparatur	250.000.000,00	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	OPD	Jumlah pakain dinas	300 stel	255.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	OPD	Jumlah pakain dinas	300 stel	255.000.000,00	
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	75.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	75.000.000,00	
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD	Jumlah Dokumen	3 dokumen	50.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD	Jumlah Dokumen	3 dokumen	50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.625.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.625.000.000,00	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35 Unit	175.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35 Unit	175.000.000,00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah jenis bahan logistik	25 Jenis	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah jenis bahan logistik	25 Jenis	50.000.000,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	OPD	Jumlah jenis barang cetakan	22 jenis	175.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	OPD	Jumlah jenis barang cetakan	22 jenis	175.000.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah buah dan Eksemplar	500 Eksemplar	75.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	OPD	Jumlah buah dan Eksemplar	500 Eksemplar	75.000.000,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	jumlah aparatur yang melaksanakan rapat dan koordinasi/konsultasi	200 OK	750.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	jumlah aparatur yang melaksanakan rapat dan koordinasi/konsultasi	200 OK	750.000.000,00	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	jumlah dokumen/kegiatan	500 Dokumen	250.000.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	jumlah dokumen/kegiatan	500 Dokumen	250.000.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	OPD	jumlah kegiatan/berita	24 berita	150.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	OPD	jumlah kegiatan/berita	24 berita	150.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1.000.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1.000.000.000,00	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah paket	10 paket	1.000.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah paket	10 paket	1.000.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	457.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	457.500.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah materai/prangko	2500 lembar	7.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah materai/prangko	Jumlah materai/prangko	7.500.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	jumlah priode pembayaran	12 bulan	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	jumlah priode pembayaran	12 bulan	250.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	jumlah jenis	50 jenis	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	jumlah jenis	50 jenis	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	425.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	425.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	48 Unit	350.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	48 Unit	350.000.000,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah unit	60 unit	75.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah unit	60 unit	75.000.000,00	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			100%	1.600.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			100%	1.600.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				900.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				900.000.000,00	
1	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya peta Berbasis Aplikasi GIS	1 Dokumen	500.000.000,00	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya peta Berbasis Aplikasi GIS	1 Dokumen	500.000.000,00	
2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	tersedianya review naskah akademik dan PERBUP	2 dokumen	400.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	tersedianya review naskah akademik dan PERBUP	2 dokumen	400.000.000,00	
C	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				700.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				700.000.000,00	
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Isentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal	1 Dokumen	400.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Isentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal	1 Dokumen	400.000.000,00	
2	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya dokumen arah kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	300.000.000,00	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya dokumen arah kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	300.000.000,00	
III	Program Promosi Penanaman Modal				2.000.000.000,00					2.000.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

D	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000,00	
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	4 Event	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	4 Event	1.500.000.000,00	
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartane gara	Terlaksananya Strategi promosi penanaman modal	1 dokumen	500.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartane gara	Terlaksananya Strategi promosi penanaman modal	1 dokumen	500.000.000,00	
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal				2.750.000.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal				2.750.000.000,00	
F	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.750.000.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.750.000.000,00	
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 permohonan	750.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 permohonan	750.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 izin	750.000.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 izin	750.000.000,00	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 aduan	500.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 aduan	500.000.000,00	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 izin	750.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	500 izin	750.000.000,00	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				1.700.000.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				1.700.000.000,00	
F	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.700.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.700.000.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan dan UMKM	50/200 perusahaan dan UMKM	350.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan dan UMKM	50/200 perusahaan dan UMKM	350.000.000,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan dan UMKM	50/400 perusahaan dan UMKM	600.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan dan UMKM	50/400 perusahaan dan UMKM	600.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan, CSR dan UMKM	50/200 perusahaan, CSR dan UMKM	750.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perusahaan, CSR dan UMKM	50/200 perusahaan, CSR dan UMKM	750.000.000,00	
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				750.000.000,00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				750.000.000,00	
G	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000,00	
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	SDM dan Aplikasi	orang dan aplikasi	750.000.000,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	SDM dan Aplikasi	orang dan aplikasi	750.000.000,00	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				16.806.834.628,00				29.464.543.729,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	14.779.969.828,00			100%	20.664.543.729,00
18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				284.999.800,00				435.000.000,00
18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	OPD		65.000.000,00	APBD			65.000.000,00
18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen	OPD		24.999.800,00	APBD			50.000.000,00
18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah dokumen	OPD	-	20.000.000,00	APBD			40.000.000,00
18	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen	OPD		20.000.000,00	APBD			40.000.000,00
18	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen	OPD		20.000.000,00	APBD			40.000.000,00
18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	OPD		135.000.000,00	APBD			200.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.880.283.426,00				15.837.044.929,00
18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	OPD		10.586.334.158,00	APBD			14.115.112.211,00
18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	OPD		893.949.748,00	APBD			1.191.932.998,00
18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	OPD		65.000.000,00	APBD			65.000.000,00
18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan	OPD		19.999.800,00	APBD			50.000.000,00
18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	OPD		284.999.720,00	APBD			384.999.720,00
18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Arsip	OPD		30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				54.998.800,00				54.998.800,00
18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	OPD		14.999.000,00	APBD			14.999.000,00
18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	OPD		39.999.800,00	APBD			39.999.800,00
18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								50.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

19	02	2.04	01	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			50.000.000,00
18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000,00				780.000.000,00
18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur	OPD		100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparatur	OPD		250.000.000,00	APBD			250.000.000,00
18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	OPD		-	APBD			255.000.000,00
18	01	2.05	03	Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	OPD		-	APBD			50.000.000,00
18	01	2.05	04	koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	OPD		-	APBD			75.000.000,00
18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	OPD		250.000.000,00	APBD			50.000.000,00
18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.186.327.440,00				1.625.000.000,00
18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	OPD		153.852.620,00	APBD			175.000.000,00
18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik	OPD		14.997.000,00	APBD			50.000.000,00
18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	OPD		100.000.000,00				175.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buah/eksemplar	OPD		45.000.000,00	APBD			75.000.000,00
18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi	OPD		599.978.000,00	APBD			750.000.000,00
18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan	OPD		199.999.820,00				250.000.000,00
18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan/berita	OPD		72.500.000,00				150.000.000,00
18	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	360.081.810,00			100%	1.000.000.000,00
18	01	2.08	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		OPD		360.081.810,00	APBD			1.000.000.000,00
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	340.428.552,00			100%	457.500.000,00
18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	OPD		5.995.000,00	APBD			7.500.000,00
18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Periode	OPD		184.953.552,00	APBD			250.000.000,00
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan	OPD		149.480.000,00	APBD			200.000.000,00
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				322.850.000,00				425.000.000,00
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan			263.620.000,00	APBD			350.000.000,00
18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit			59.230.000,00	APBD			75.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				99.999.800,00				1.600.000.000,00
18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				99.999.800,00	APBD			900.000.000,00
18	02	2.02	02	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya peta berbasis aplikasi Gis	kab. Kutai Kartanegara		99.999.800,00	APBD			500.000.000,00
19	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya review naskah akademis dan PERBUP	kab. Kutai Kartanegara			APBD			400.000.000,00
18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								700.000.000,00
18	02	2.01	01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal	Dalam dan Luar Daerah						400.000.000,00
18	02	2.01	02	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	tersedianyaq dokumen arah kebijakan penanaman modal	Kab. Kutai Kartanegara						300.000.000,00
18	03			Program Promosi Penanaman Modal				700.000.000,00				2.000.000.000,00
18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-				2.000.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

18	02	2.02	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	Dalam dan Luar Daerah	50%	700.000.000,00			70%	1.500.000.000,00
18	02	2.02	02	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya promosi penanaman modal	Kab. Kutai Kartanegara	50%	-			70%	500.000.000,00
18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal				399.788.000,00				2.750.000.000,00
18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				399.788.000,00				2.750.000.000,00
18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan Non perizinan	Dalam dan Luar Daerah		100.000.000,00	APBD			750.000.000,00
18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan Non perizinan	Dalam dan Luar Daerah		100.000.000,00				750.000.000,00
18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah perizinan dan Non perizinan	Dalam dan Luar Daerah		99.788.000,00	APBD			500.000.000,00
18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah perizinan dan Non perizinan	Dalam dan Luar Daerah		100.000.000,00	APBD			750.000.000,00
18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				635.173.000,00				1.700.000.000,00
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota				635.173.000,00				1.700.000.000,00
18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dan UMKM	Dalam dan Luar Daerah	70%	210.000.000,00			80%	350.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2022

18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dan UMKM	Dalam dan Luar Daerah	-	210.000.000,00	APBD		-	600.000.000,00
18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dan UMKM	Dalam dan Luar Daerah		215.173.000,00				750.000.000,00
18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				191.904.000,00				750.000.000,00
18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				191.904.000,00	APBD		200 pemohon	750.000.000,00
18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	SDM dan Aplikasi	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah		191.904.000,00	APBD		1 paket data	750.000.000,00

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.16.806.834,63,- dan mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.12.657.709,10,- (75,31%), menjadi Rp.29.464.543,72,- Adapun Program/Kegiatan yang mengalami kenaikan pagu anggaran diantaranya :

1. Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran Th 2021 sebesar Rp.284.999.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.150.657.709,10,- (52,63%) menjadi Rp.435.000.000,00,-
Alasan Kenaikan Pagu Anggaran, mengingat adanya penambahan sub kegiatan dan tim pembuat laporan melibatkan lintas perangkat daerah guna sinkronisasi laporan keuangan sebagai Akuntabilitas/pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang, maka sangatlah perlu untuk disajikan secara baik sebagai pertimbangan pengambil kebijakan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pada Program /Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp.11.880.283,43,- mengalami kenaikan sebesar Rp.3.956.761,50,- (33,31%) menjadi Rp.15.837.044,93,-
Alasan : Hal ini terjadi disebabkan adanya Kenaikan Pangkat/Gol, Kenaikan Gaji berkala dan kenaikan Tunjangan PNS dan Tambahan Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan terhadap THL sesuai aturan dan ketentuan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pagu Anggaran Program/Kegiatan ini di Tahun 2021 sebesar Rp.350.000.000,00,- dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar (99,78%) atau senilai Rp.780.000.000,00,-
Alasan kenaikan pagu anggaran diperlukannya peningkatan SDM Aparatur, dan adanya penambahan sub kegiatan yang semula 2 kegiatan menjadi 6 Sub Kegiatan yang diperlukan di Tahun 2022, dimana di Tahun sebelumnya tidak dianggarkan diantaranya koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Penilaian Kinerja Pegawai dan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
4. Administrasi Perangkat Umum Perangkat Daerah
Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.438.672.560,00,- (36,98%) dari pagu anggaran sebelumnya Tahun 2021 Rp.1.186.327.440,00,- menjadi

Rp.1.625.000.000,00,- Kenaikan pagu anggaran Th 2022 dipengaruhi adanya penambahan penyediaan peralatan, perlengkapan serta adanya rapat-rapat koordinasi perangkat daerah.

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Kegiatan ini mengalami peningkatan pagu anggaran yang cukup signifikan, Pagu anggaran di Tahun 2021 Rp. 360.081.810,00,- di Tahun 2022 menjadi Rp.1.000.000.000,00,- mengalami peningkatan sebesar (177,71%) atau Rp.639.918.190,00,-
Alasan Kenaikan perlu adanya pengadaan peralatan dan mesin lainnya dalam rangka menunjang kerja perangkat daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada Program/Kegiatan ini sebelumnya Tahun 2021 mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp.360.081.810,00,- di Tahun 2022 mengalami peningkatan pagu anggaran sebesar (34,39%) atau Rp.117.071.448,00,- menjadi Rp.457.500.000,00,-
Alasan kenaikan tersebut karena adanya peningkatan penggunaan jasa komunikasi (Jaringan internet) dan jasa Perawatan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Pada program/kegiatan ini juga demikian adanya kenaikan pagu anggaran yang di Tahun 2021 sebesar Rp.322.850.000,00,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 425.000.000,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp.102.150.000,00,- (31,64%)
Alasan kenaikan dikarenakan biaya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan / operasional meningkat.
8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Di Tahun 2021 Program/kegiatan ini hanya mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 99.999.800,00,- sedangkan Tahun 2022 mengalami kenaikan pagu anggaran yang sangat signifikan sebesar Rp.1.500.000.200,00,- (1500%) menjadi Rp.1.600.000.000,00,-
Dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal maka perlu memaksimalkan fungsinya mulai dari pengkajian, pengusulan, perencanaan, perumusan, pengembangan hingga pemetaan penanaman modal agar tercipta potensi-potensi dan peluang penanaman modal di daerah melalui Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Daerah Kabupaten/Kota. Alasan ini lah yang menjadi kenaikan pagu anggaran pada program/kegiatan ini di Tahun 2022.

9. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program/kegiatan ini juga mengalami kenaikan pagu anggaran yang semula Tahun sebelumnya 2021 sebesar Rp.700.000.000,00,- menjadi Rp. 2.000.000.000,00,- di Tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (185,71%), disebabkan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, terutama pada sub kegiatan promosi penanaman modal mengikuti pameran-pameran promosi baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, serta di tahun 2022 dibutuhkannya penyusunan strategi promosi penanaman modal.

10. Program Pelayanan penanaman modal

Pada program/ kegiatan ini di Tahun 2021 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.399.788.000,00,- Sedangkan di Tahun 2022 sebesar Rp.2.750.000.000,00,- mengalami peningkatan sebesar Rp.2.350.212.000,00,- (587,86%).

Kenaikan pagu anggaran tersebut disebabkan oleh semua sub kegiatan yang dilaksanakan seperti peningkatan pelayanan, pemantauan, pemenuhan komitmen, dan peningkatan layanan konsultasi/pengaduan serta koordinasi dan sinkronisasi penetapan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku

11. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Pagu anggaran di Tahun 2021 Rp.635.173.000,00,- sedangkan di Tahun 2022 mengalami kenaikan (167,64%) atau senilai Rp.1.064.827.000,00,- jadi pagu anggaran th 2022 sebesar Rp.1.700.000.000,00,-

Kenaikan pagu anggaran di tahun 2022 di seluruh sub kegiatan yang ada baik pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dalam rangka pengendalian penanaman modal terhadap investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal.

12. Program Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal

Tahun sebelumnya Tahun 2021 Program/ kegiatan Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman modal mempunyai pagu anggaran Rp.191.904.000,00,- di Tahun 2022 mengusulkan kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.750.000.000,00,- jadi ada kenaikan 290,82% atau senilai Rp.558.096.000,00,-

Pada beberapa sub kegiatan yang ada mengalami peningkatan pagu anggaran diantaranya pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem terintegrasi secara elektronik, untuk menunjang hal tersebut diatas perlu adanya upgrade sistem aplikasi dan sdmnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.” Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0% /tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0-4,6%, dan gini ratio mencapai 0,370-0,374. Target RPJMN ini menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 dan ketidakpastian politik Amerika Serikat yang akan menghadapi Pemilihan Presiden pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), mengusung tema “Meningkatkan investasi dan daya saing industri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi” dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 5,3-5,7%. Menghadapi tantangan global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong melalui 3 sektor prioritas RKP 2021, yaitu sektor industri, sektor pariwisata, dan peningkatan sektor investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara (2016 – 2021), tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara tahun 2021 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 5 “ Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.” RENJA 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara Tujuan dan Sasaran urusan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan misi 5 Bupati Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara
Tahun 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatkan Transparansi dan Akutabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatkan Transparansi dan Akutabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Insvestasi (PMDN/PMA)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pelaku usaha dan mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon investor di Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2021 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan potensi investasi daerah, insentif/fasilitasi kemudahan berusaha, promosi dan pelayanan perizinan.
- b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara pada tahun 2021, pada awalnya disusun sebanyak 4 (empat) program. Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2016-2021, menjadi 5 (lima) program, yaitu :
 - (1) Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal,
 - (2) Program Promosi Penanaman Modal
 - (3) Program Pelayanan Penanaman Modal,
 - (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - (5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan. Program promosi penanaman modal berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten. Hasil RENJA 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuran kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Untuk tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) program dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp. **29.464.543.729,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel T – C. 32
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modalb				29.464.543.729,00				29.814.543.729,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	20.664.543.729,00			100%	20.614.543.729,00
18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				435.000.000,00				435.000.000,00
18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	OPD	2 Dokumen	65.000.000,00	APBD		2 Dokumen	65.000.000,00
18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	OPD	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00

18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OPD	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD		1 Dokumen	40.000.000,00
18	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	OPD	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD		1 Dokumen	40.000.000,00
18	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	OPD	1 Dokumen	40.000.000,00	APBD		1 Dokumen	40.000.000,00
18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	OPD	6 Dokumen	200.000.000,00	APBD		6 Dokumen	200.000.000,00
18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.837.044.929,00				15.837.044.929,00
18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMTSP	OPD		14.115.112.211,00	APBD			14.115.112.211,00
18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	OPD	49 Orang	1.191.932.998,00	APBD		49 Orang	1.191.932.998,00
18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	OPD	1 Dokumen	65.000.000,00	APBD		1 Dokumen	65.000.000,00
18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen	OPD	5 Dokumen	50.000.000,00	APBD		5 Dokumen	50.000.000,00
18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	OPD	3 Dokumen	384.999.720,00	APBD		3 Dokumen	384.999.720,00

18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	OPD	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD		1 Dokumen	30.000.000,00
18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				54.998.800,00				54.998.800,00
18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	OPD	1 Dokumen	14.999.000,00	APBD		1 Dokumen	14.999.000,00
18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	OPD	2 Dokumen	39.999.800,00	APBD		2 Dokumen	39.999.800,00
18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				50.000.000,00				50.000.000,00
18	01	2.04	01	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen	OPD, Perusahaan dan Perorangan	100%	50.000.000,00	APBD		100%	50.000.000,00
18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				780.000.000,00				780.000.000,00
18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OPD	15 Aparatur	100.000.000,00	APBD		15 Aparatur	100.000.000,00
18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	OPD	75 Aparatur	250.000.000,00	APBD		75 Aparatur	250.000.000,00

18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakain dinas	OPD	300 stel	255.000.000,00	APBD		300 stel	255.000.000,00
18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	OPD	1 dokumen	50.000.000,00	APBD		1 dokumen	50.000.000,00
18	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	OPD	1 dokumen	75.000.000,00	APBD		1 dokumen	75.000.000,00
18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	OPD	1 dokumen	50.000.000,00	APBD		1 dokumen	50.000.000,00
18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.625.000.000,00				1.625.000.000,00
18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	OPD	35 Unit	175.000.000,00	APBD		35 Unit	175.000.000,00
18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik	OPD	25 Jenis	50.000.000,00	APBD		25 Jenis	50.000.000,00
18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	OPD	22 jenis	175.000.000,00	APBD		22 jenis	175.000.000,00
18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Buah/Eksemplar	OPD	500 Eksemplar	75.000.000,00	APBD		500 Eksemplar	75.000.000,00
18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi	OPD	200 OK	750.000.000,00	APBD		200 OK	750.000.000,00
18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan	OPD	500 Dokumen	250.000.000,00	APBD		500 Dokumen	250.000.000,00

18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita	OPD	24 berita	150.000.000,00	APBD		24 berita	150.000.000,00
18	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1.000.000.000,00	APBD		100%	1.000.000.000,00
18	01	2.08	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	OPD		1.000.000.000,00	APBD			1.000.000.000,00
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	457.500.000,00			100%	457.500.000,00
18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko	OPD	2500 lembar	7.500.000,00	APBD		2500 lembar	7.500.000,00
18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Priode Pembayaran	OPD	12 bulan	250.000.000,00	APBD		12 bulan	250.000.000,00
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	OPD	50 jenis	200.000.000,00	APBD		50 jenis	200.000.000,00
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				425.000.000,00				425.000.000,00
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	OPD	48 Unit	350.000.000,00	APBD		48 Unit	350.000.000,00
18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	OPD	60 unit	75.000.000,00	APBD		60 unit	75.000.000,00

18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				1.600.000.000,00				1.600.000.000,00
18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				900.000.000,00				900.000.000,00
18	02	2.02	02	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Berbasis Aplikasi GIS	1 Dokumen		500.000.000,00	APBD		1 Dokumen	500.000.000,00
18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya review naskah Akademis dan PERBUP	2 dokumen		400.000.000,00	APBD		2 dokumen	400.000.000,00
18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				700.000.000,00				700.000.000,00
18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal	1 Dokumen		400.000.000,00	APBD		1 Dokumen	400.000.000,00
18	02	2.01	02	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen arah kebijakan penanaman modal	1 Dokumen		300.000.000,00	APBD		1 Dokumen	300.000.000,00
18	03			Program Promosi Penanaman Modal			100%	2.000.000.000,00			100%	2.400.000.000,00

18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000,00				2.400.000.000,00
18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	Dalam dan Luar Daerah	4 event	1.500.000.000,00	APBD		4 event	1.800.000.000,00
18	03	2.01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya promosi penanaman modal	Kab. Kutai Kartanegara	1 dokumen	500.000.000,00	APBD		1 dokumen	600.000.000,00
18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal			100%	2.750.000.000,00			100%	2.750.000.000,00
18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.750.000.000,00				2.750.000.000,00
18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dalam dan Luar Daerah	500 permohonan	750.000.000,00	APBD		500 permohonan	750.000.000,00
18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dalam dan Luar Daerah	500 izin	750.000.000,00	APBD		500 izin	750.000.000,00

18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dalam dan Luar Daerah	500 aduan	500.000.000,00	APBD		500 aduan	500.000.000,00
18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dalam dan Luar Daerah	500 izin	750.000.000,00	APBD		500 izin	750.000.000,00
18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				1.700.000.000,00				1.700.000.000,00
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100%	1.700.000.000,00			100%	1.700.000.000,00
18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dan UMKM	Dalam Daerah dan Luar Daerah	50/200 perusahaan dan UMKM	350.000.000,00	APBD		50/200 perusahaan dan UMKM	350.000.000,00
18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dan UMKM	Dalam Daerah dan Luar Daerah	50/400 perusahaan dan UMKM	600.000.000,00	APBD		50/400 perusahaan dan UMKM	600.000.000,00
18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan, CSR dan UMKM	Dalam Daerah dan Luar Daerah	50/200 perusahaan, CSR dan UMKM	750.000.000,00	APBD		50/200 perusahaan, CSR dan UMKM	750.000.000,00
18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			100%	750.000.000,00			100%	750.000.000,00

18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		OPD		750.000.000,00	APBD			750.000.000,00
18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	SDM dan Aplikasi	Kecamatan, OPD dan Luar Daerah	orang dan aplikasi	750.000.000,00	APBD		orang dan aplikasi	750.000.000,00

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ***“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022 mendatang.

Tenggarong, 30 Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara,



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002